

Pelatihan Manajemen Komunikasi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (*Communication Management Training at the Village Consultative Body in Improving Community Empowerment*)

Dwinarko Dwinarko¹, Ari Sulistyanto^{2*}, Aan Widodo³, Saeful Mujab⁴

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta, Jakarta Selatan^{1,2,3,4}

dwinarko@dsn.ubharajaya.ac.id¹, ari.sulistyanto@dsn.ubharajaya.ac.id^{2*},

aan.widodo@dsn.ubharajaya.ac.id³, saeful.mujab@dsn.ubharajaya.ac.id⁴



Riwayat Artikel

Diterima pada 25 Mei 2021

Direvisi pada 9 Juni 2021

Disetujui pada 10 Juni 2021

Abstract

Purpose: The ability in planning communication, organizing messages, implementing and supervising members of the Village Community Empowerment Agency (BPD) is needed so that they are able to build synergies with the community and village heads for village development in Subang Regency.

Method: To improve this ability, communication management training activities were carried out. The method was carried out through lectures and discussions.

Results: The results obtained were an increase in positive understanding related to communication management carried out in community empowerment and the satisfaction with the material presented. This is indicated by 92.3%, that the material presented provides benefits and new understanding in community empowerment.

Conclusions: Through this training activity, members of the Village Community Empowerment Agency (BPD) are able to improve their abilities in planning communication and organizing messages in carrying out their duties as BPD members in the implementation and supervision of village development.

Keywords: *Community empowerment, Training, Communication management*

How to cite: Dwinarko, D., Sulistyanto, A., Widodo, A., & Mujab, S. (2021). Pelatihan Manajemen Komunikasi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Yumary: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(4), 217-225.

1. Pendahuluan

1.1. Analisis situasi

Pembangunan desa merupakan sebuah konsep perencanaan kegiatan yang diawali dari tingkat yang paling bawah dengan tujuan mampu menyerap aspirasi masyarakat. Kemampuan menyerap aspirasi masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan agar dapat memperoleh informasi yang jelas tentang kondisi nyata dan situasi persoalan yang dibutuhkan dalam menyusun perencanaan dan pengawasan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan menyerap aspirasi yang handal dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Sama halnya dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Lembaga pemegang aspirasi untuk menjalankan roda pembangunan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau di tingkat daerah oleh DPRD tingkat I dan II. Dalam Pemerintahan Desa, sesuai dengan ketentuan perundangan desa menjelaskan untuk menjalankan fungsi pemerintahan desa itu tidak hanya monopoli Kepala

Desa, melainkan juga adanya keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara partisipatif. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga desa dibentuk dengan tujuan secara kolektif bersama aparatur Desa membantu pelaksanaan untuk memobilisasi pembangunan desa. Mekanisme anggota-anggota yang duduk dalam BPD adalah perwakilan dari penduduk desa. ([UU Desa No. 6 Tahun 2014, 2014](#))

Peran utama adalah menyuarakan aspirasi menyusun bersama pembangunan Desa, seperti tertuang dalam [Undang-Undang No.6 Tahun 2014](#) pada pasal 1, ayat 12 mengenai pemberdayaan masyarakat desa. Peran penunjang lain adalah melakukan pemberdayaan masyarakat. Ini dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan dan perilaku masyarakat desa untuk menuju pada kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada yang disesuaikan kebutuhan dan tingkat permasalahan yang dihadapi. ([UU Desa No. 6 Tahun 2014](#)).

Salah satu, upaya peningkatan peran Badan Permusyawaratan Desa yang dilakukan Kabupaten Subang, yaitu dengan membentuk Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK BPD). Forum itu terbentuk berdasarkan perwakilan dari Ketua dari 27 kecamatan sekabupaten Subang ([Ridwan, 2020](#)). Dengan terbentuknya forum tersebut sebagai ajang komunikasi dan interaksi serta koordinasi anggota BPD Kabupaten Subang. Berdasarkan pernyataan Tatang sebagai pejabat Kabid Kelembagaan Dispermades menyatakan berdirinya FK-BPD Kabupaten Subang bisa berjalan sinergis apabila ada motivasi dan niat yang ikhlas para anggota, pengelolaan organisasi yang unggul, kecakapan anggota serta ketersediaan dana. Di tambahkan lagi, berkaitan dengan keberadaan Forum Kepala Desa jangan sampai FK BPD bersaing dan berbenturan, sebaiknya bisa melakukan kerjasama yang sinergis. Apabila terjadi perbedaan dalam penerapan kebijakan pembangunan desa, kedua forum ini bisa mengedepankan pada *win-win solution* yang mengutamakan pada kepentingan warga ([Ridwan, 2020](#)).

Akan tetapi dalam menjalankan perannya, seperti yang ungkapkan oleh Onong Sutadi ketua BPD Desa Ponggang, Kab. Subang, menyatakan, “keterbatasan sebagian besar anggota BPD adalah lemahnya sumber daya manusia BPD sendiri mengenai kemampuan dalam mengelola untuk menyerap aspirasi dan menyusun berbagai aspirasi sebagai masukan kepada Kepala Desa, sehingga ketika terjadi pembahasan mengenai peraturan desa (Perdes), minim sekali kontribusi dari BPD ([Sutadi, 2020](#)). Pendapat dari Onong Sutadi juga dirasakan anggota Forum BPD lain. Di samping itu, kelemahan lain seperti ketika melakukan pembahasan dan melakukan kesepakatan dalam Rancangan Peraturan Desa (Perdes) bersama Kepala Desa, juga ketika melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Kelemahan tersebut disebabkan karena faktor-faktor seperti adanya keterbatasan kapasitas sumber daya anggota BPD, ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang mendukung serta tunjangan kesejahteraan dalam menunjang operasional anggota BPD dari desa relatif kecil ([Romli & Nurlia, 2017](#)).

Berkaitan dengan kelemahan yang dimiliki oleh anggota BPD, hal terpenting dan mendapatkan prioritas adalah mengenai peningkatan kapasitas sumber daya anggota BPD. Bentuk kegiatan dilakukan dengan pelatihan dengan fokus pada kemampuan manajemen komunikasi. Materi ini penting yang sebenarnya untuk menunjang kegiatan anggota BPD yang sebagian besar kegiatan adalah komunikasi.

1.2. Permasalahan Mitra

Berkaitan dengan kondisi tersebut permasalahan yang dihadapi anggota BPD.

- a. Perencanaan Komunikasi
 - Kurangnya kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi dan situasi permasalahan desa.
 - Kurangnya kemampuan dalam menampung aspirasi masyarakat desa yang disusun dalam bentuk laporan yang sistematis.
- b. Pengorganisasian Pesan Komunikasi
 - Kurangnya kemampuan dalam pengorganisasian pesan permasalahan desa dalam bentuk tertulis dan lisan.

- c. Pelaksanaan dan Pengawasan Komunikasi
 - Kurangnya kemampuan dalam berkomunikasi dengan perangkat desa dalam masalah kontrol dan evaluasi pembangunan desa.

1.3. Target Luaran

Melalui kegiatan ini di harapkan:

- a. Adanya kemampuan dalam mengidentifikasi kondisi dan situasi permasalahan desa dan menampung aspirasi masyarakat desa yang disusun dalam bentuk laporan yang sistematis.
- b. Adanya kemampuan dalam mengkomunikasikan permasalahan desa dalam bentuk tertulis dan lisan untuk melakukan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.
- c. Adanya kemampuan dalam berkomunikasi dengan perangkat desa dalam masalah kontrol dan evaluasi pembangunan desa.

Dengan demikian kegiatan ini dapat memberi manfaat pada sinergitas pembangunan desa antara aspirasi yang dikehendaki masyarakat dengan pemangku kepentingan atau pengambil kebijakan desa (Kepala Desa) dan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan social mayarakat Desa, di Kabupaten Subang.

1.4. Kajian Literatur

Dalam pemberdayaan masyarakat tujuan utama adalah mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu perlu berbagai upaya dengan melihat pada potensi lokal desa itu sendiri. Namun yang terpenting dari hal tersebut adalah pelaku pembangunan, yaitu masyarakat desa itu sendiri yang mempunyai motivasi, kesadaran, dan pengetahuan untuk mencapai tujuan tersebut. Faktor-faktor yang melekat pada pelaku pembangunan Desa kadang kala terbatas dikarenakan kurangnya daya penggerak, pengetahuan, sarana dan prasarana untuk mengakses informasi tidak mendukung. BPD adalah salah satu aktor pembangunan Desa. Oleh karena itu dibutuhkan kompetensi yang memadai, dan salah satu bentuk kompetensi yang dimiliki anggota BPD adalah kemampuan dalam melakukan manajemen komunikasi.

Oleh karena itu, pelatihan manajemen komunikasi merupakan bagian dari strategi organisasi dalam upaya untuk meraih tujuan bersama. Proses perencanaan, pengorganisasi, kepemimpinan dan pengawasan dibutuhkan tindakan berupa komunikasi efektif. Artinya pemahaman terhadap berbagai aspek lingkungan masyarakat harus dapat dipahami. Setelah pemahaman situasi dan kondisi, maka langkah dan tindakan selanjutnya dengan melakukan pilihan formulasi komunikasi yang tepat dengan berbagai pertimbangan mengenai pesan seperti apa yang perlu di sampaikan, dan pemilihan media yang tepat sebagai sarana penyampai pesan. Penentuan formulasi komunikasi menjadi kunci utama menentukan arah kebijakan dalam menampung aspirasi, komunikasi organisasi atau dalam musyawarah organisasi, serta melakukan pengawasan yang sinergis dalam berbagai elemen yang terkait secara berkelanjutan. Menurut [Ali Algahtani](#) menjelaskan bahwa pengertian manajemen adalah pengarah pelaksanaan suatu kelompok atau organisasi melalui posisi eksekutif, administratif, dan pengawasan ([Algahtani, 2014](#)). Sementara, Kotter dalam [Algahtani \(2014\)](#) menyatakan, manajemen adalah keseluruhan kegiatan yang berorientasi pada perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, koordinasi dan evaluasi kegiatan untuk kelompok atau organisasi.

Di sisi lain, pengertian komunikasi adalah kegiatan dalam bentuk proses yang dilakukan baik individu maupun kelompok formal-informal, organisasi, dan masyarakat menggunakan dan menciptakan, serta menggunakan pesan-pesan komunikasi agar bisa menjalin interaksi dengan pihak lain dan lingkungan ([Zepeda, 2018](#)). Oleh sebab itu, manajemen komunikasi adalah pemahaman 2 konsep yang berbeda, yaitu komunikasi dan manajemen. Kedua konsep ini bisa diaplikasikan dalam berbagai realitas komunikasi. Manajemen mengandung unsur pengelolaan, dan komunikasi merupakan interaksi sosial dengan perantara simbol-simbol bahasa ([Cutlip, 2008](#)). [Kaye \(1994\)](#) manajemen komunikasi adalah bagaimana cara mengelola proses komunikasi mereka melalui menafsirkan makna tentang hubungan dengan orang lain dalam berbagai pengaturan. Mereka mengelola komunikasi dan tindakan dalam

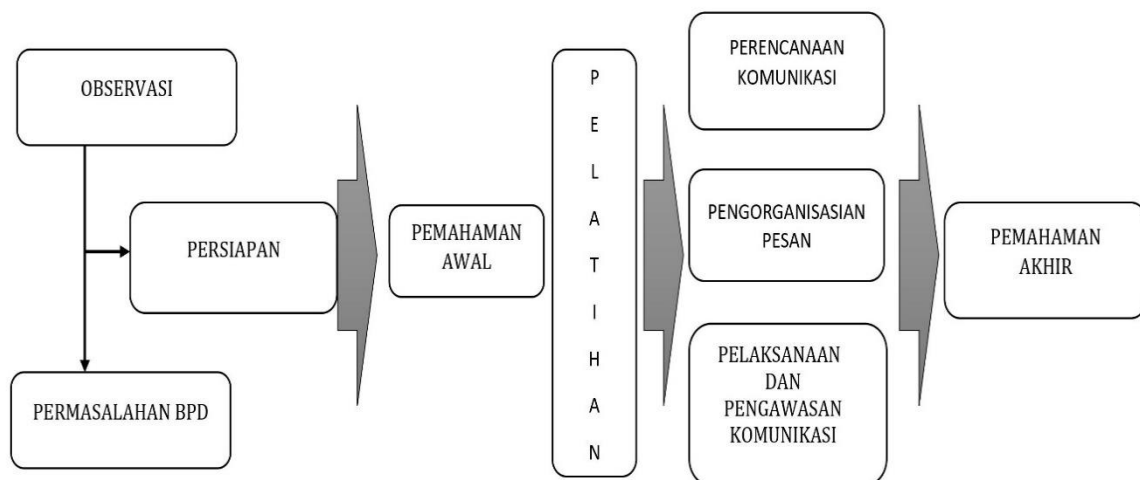
konteks yang profesional (Kaye, 1994). Dalam pemahaman umum, manajemen komunikasi adalah pengelolaan pesa Pelatihan Manajemen Komunikasi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat n antara komunikator dan komunikan yang terikat untuk bisa memahami makna bersama (J. Bartels, 2010). Dengan demikian, manajemen komunikasi merupakan pengelolaan komunikasi mulai dari perencanaan komunikasi, pengorganisasian komunikasi, pelaksanaan dan pengawasan atau evaluasi komunikasi yang bisa diterapkan dalam berbagai bentuk kegiatan.

Berdasarkan pengertian di atas, konsep manajemen komunikasi menjadi landasan materi pelatihan Forum BPD Kabupaten Subang. Oleh karena itu materi pelatihan di fokuskan pada perencanaan komunikasi, pengorganisasian komunikasi dan pelaksanaan dan pengawasan komunikasi. Melalui pelatihan tersebut diharapkan adanya kerja sama yang sinergis antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan aparatur pemerintah Desa dalam pemberdayaan pembangunan.

2. Metode

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) merupakan bentuk pengabdian masyarakat dilakukan oleh Tim PKM Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Komunikasi (FIKOM Ubhara Jaya). Kegiatan berlangsung selama 3 bulan, antara bulan September sampai November 2020. Dengan *schedule* kegiatan, mulai dari masa persiapan sampai pada pelaksanaan. Tempat yang digunakan adalah Aula Serba Guna Kabupaten Subang dengan protokol kesehatan yang ketat. Peserta ada 30 orang yang merupakan anggota Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK BPD) Kabupaten Subang.

Mengenai metode pelatihan secara detail dapat dilihat dalam alur sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Metode Kegiatan

Keterangan:

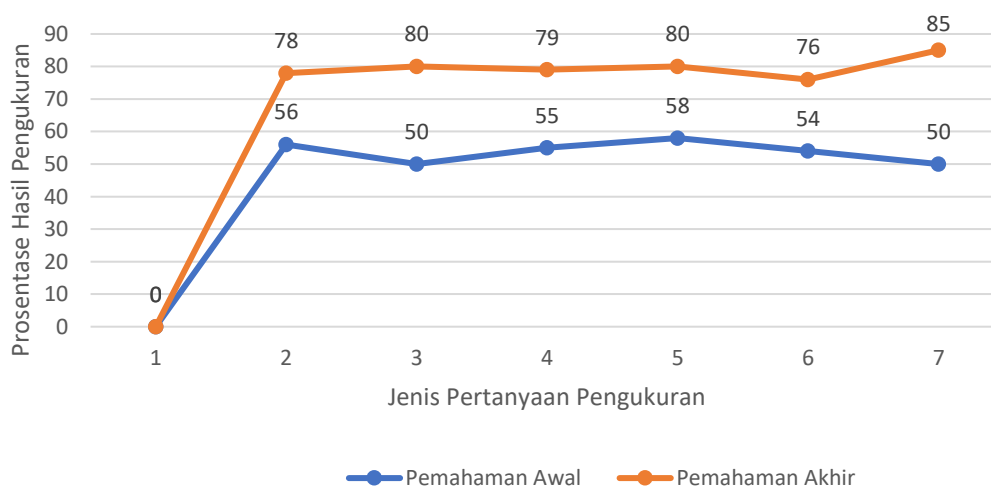
1. Observasi dilakukan untuk menggali permasalahan mitra dengan melakukan wawancara dengan pengurus maupun anggota FK BPD Kabupaten Subang.
2. Tahap persiapan merupakan perencanaan dalam kegiatan pelatihan yang meliputi, persiapan materi pelatihan, penentuan tempat dan tanggal pelatihan.
3. Pemahaman awal, sebelum dilakukan acara pelatihan dilakukan pengukuran mengenai pemahaman manajemen komunikasi.
4. Pelatihan, dalam kegiatan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi.
5. Pemahaman akhir, setelah kegiatan ceramah dan diskusi berakhir, dilakukan pengukuran terhadap pemahaman materi yang telah disampaikan.

Tabel 1. Materi dan Indikator Pengukuran

Materi	Indikator
Perencanaan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu menyusun daftar atau inventarisasi permasalahan desa. - Menyusun skala prioritas sesuai dengan aspirasi masyarakat
Pengorganisasian Pesan	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu Kemampuan dalam komunikasi internasional secara vertikal dan horizontal. - Mampu menyampaikan permasalahan secara tertulis dan lisan.
Komunikasi Dalam Pelaksanaan dan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu melakukan komunikasi dengan perangkat desa dalam masalah kontrol pembangunan desa. - Mampu melakukan komunikasi untuk melakukan evaluasi pembangunan desa.

3. Hasil dan Pembahasan

Sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan, diadakan pengukuran terhadap pemahaman mengenai manajemen komunikasi. Hasil dari pengukuran dari pemahaman awal sebesar 53.8 %. Setelah pelatihan dilakukan pemahaman meningkat menjadi 79.6 %. Detail mengenai pemahaman peserta pelatihan manajemen komunikasi pada tabel 2.



Gambar 2. Hasil Pengukuran Pelatihan Manajemen Komunikasi

Dalam kegiatan PKM ini perlu umpan balik atau tanggapan dari peserta agar menjadi bahan evaluasi untuk merancang kegiatan berikutnya. Dari 30 peserta, mereka menilai kegiatan pelatihan ini mempunyai dampak positif terhadap peran mereka sebagai anggota BPD dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemahaman terhadap peran dan tugas sebagai anggota BPD penting, seperti di atur dalam pasal 55 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Desa, mengatur fungsi BPD ([Istiqomah, 2015](#)):

- BPD bersama Kepala Desa melakukan pembahasan dan kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa (Perdes).
- Menjalankan peran perwakilan, yaitu penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat Desa.
- Melakukan peran untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan aparatur Desa.

Tabel 2. Tanggapan Peserta terhadap Kegiatan Pelatihan

Indikator Tanggapan Kegiatan Pelatihan	Hasil Tanggapan				
	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Netral	Setuju	Sangat Setuju
Penyajian materi mudah dipahami sesuai manfaat yang diharapkan	0	0	0	2	3
Materi pelatihan memberi dampak 4 dalam menjalankan tugas pemberdayaan masyarakat	0	0	0	2	2
Bahasa yang digunakan pemateri mudah dipahami	0	0	1	3	3
Pertanyaan dari peserta bisa dijawab dengan baik oleh pemateri	0	1	0	2	4
Materi pelatihan memberi inspirasi untuk menjalankan tugas pemberdayaan	0	0	0	3	1
Pemateri bisa menyajikan kasus mengenai kinerja BPD dalam pemberdayaan masyarakat desa.	0	0	0	2	1
Jumlah	0	1	1	14	14
Prosentase		3.3	3.3	46.6	46.6
Total jumlah yang setuju dan tidak setuju					93.2

Dari keseluruhan tanggapan sebanyak 30 peserta pelatihan manajemen komunikasi 93.2 % memberikan tanggapan positif terhadap kegiatan tersebut. Para peserta menyatakan materi yang di sampaikan Tim PKM Fikom Universitas Bhayangkara Jakarta memberi kepuasan, manfaat dan pemahaman baru dalam pemberdayaan masyarakat.



Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan



Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan

3.1. *Perencanaan Komunikasi*

Perencanaan komunikasi adalah bentuk kegiatan yang melibatkan proses mendayagunakan sumber daya komunikasi sebagai upaya dalam mencapai tujuan organisasi ([Cangara, 2013](#)). Pengelolaan sumber daya dimaksudkan untuk mengelola segala aktivitas agar tujuan dari komunikasi mempunyai dampak seperti yang diharapkan. Anggota BPD sebagai mitra dari kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Hal ini karena perannya sebagai penyalur aspirasi masyarakat tingkat desa. Kemampuan mendasar keterampilan komunikasi adalah melakukan perencanaan komunikasi.

UNESCO membuat tahapan-tahapan perencanaan komunikasi yang bisa dimaksimalkan, yakni ([Cangara, 2013](#)):

1. Melakukan tahap pengumpulan data mengenai potensi sumber daya komunikasi yang sedang berlangsung di berbagai tempat, seperti instansi pemerintah, dan swasta, atau merupakan kombinasi dari keduanya.
2. Mengadakan tahapan analisis data mengenai pola dan penggunaan media komunikasi yang ada, yakni dengan melihat berbagai ketersediaan media, seperti surat kabar, stasiun televisi dan radio, serta multimedia yang digunakan masyarakat.
3. Melakukan analisa kritis mengenai kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan komunikasi yang dibutuhkan masyarakat. Dengan mengidentifikasi, apakah dalam bentuk hiburan, informasi, pendapat, dan berita.
4. Menyediakan tahapan analisis terhadap komponen komunikasi, seperti sumber pesan atau komunikator, susunan pesan, saluran atau media, penerima atau komunikan, dan dampak komunikasi dari masyarakat.
5. Menyediakan tahapan analisis pengembangan komunikasi, dengan kriteria, komunikasi yang dilakukan mengalami kemajuan dalam hal jumlah (kuantitas), sebaran, atau peringkat dalam tayangannya.
6. Menyediakan tahapan dalam menyusun tujuan dan target yang hendak dicapai dengan menyesuaikan pada kebijaksanaan komunikasi yang ada.

Tahapan tersebut menjadi bahan materi dalam pelatihan manajemen komunikasi. Dengan berbagai modifikasi yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan peserta. Materi yang diprioritaskan adalah mengenai komunikasi dengan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Hasil identifikasi dituangkan dalam kertas kerja yang menjadi bahan untuk di sampaikan pada saat rapat Desa. Pada sesi ini, peserta menanyakan mengenai format membuat kertas kerja dalam bentuk laporan tertulis yang merupakan data otentik tentang permasalahan desa.

3.2. Pengorganisasian Pesan

Garis besar pengertian pengorganisasian pesan adalah proses dalam menyusun struktur pesan yang berkaitan dengan sasaran, ketersediaan sumber daya yang dimiliki, dan kondisi lingkungan yang mempengaruhinya. Pengorganisasian pesan menjadi elemen penting dalam menjalankan fungsi manajemen komunikasi dalam menjalankan sistem pengelolaan pesan dengan model atau kategori tertentu sebagai upaya untuk mencapai tujuan. ([Haryanto et al., 2020](#)).

Pada pelatihan, materi pengorganisasian pesan difokuskan pada hubungan komunikasi, pola komunikasi, kategori pola komunikasi, mengelola komunikasi, keterampilan dalam komunikasi. Melalui materi ini, peserta mampu menjalin hubungan komunikasi secara vertical, yaitu komunikasi dengan kepala desa dan komunikasi horizontal, yaitu menjalin komunikasi dengan warga. Pola komunikasi merupakan standar protokol komunikasi. Improvisasi dalam melakukan pola komunikasi bisa dilakukan dan tidak menyimpang dengan standar protokol komunikasi yang disepakati bersama dalam rapat antara Kepala Desa dan BPD. Dalam hal ini, pola yang harus dilakukan, seperti membuka percakapan dengan salam, menanyakan keadaan, dan kemudian bisa dilanjutkan dengan melakukan pendalaman untuk melakukan investigasi berkaitan dengan permasalahan desa. Begitu juga, ketika melakukan komunikasi dengan kepala desa atau perangkat desa. Pola ini dilakukan dalam kondisi pertemuan formal dan informal.

3.3. Komunikasi dalam Pelaksanaan dan Pengawasan

Komunikasi dalam pelaksanaan dan pengawasan merupakan praktik langsung dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan komunikasi atau yang disebut dengan audit komunikasi. Dalam audit komunikasi, kriteria pengukuran dilakukan dengan membandingkan pencapaian tujuan dengan standar yang telah disusun. Contohnya, pada pola komunikasi dalam penyerapan aspirasi masyarakat. Untuk menilai keberhasilan pola komunikasi adalah sejauh mana pola komunikasi dilakukan sudah memenuhi standar pelaksanaan komunikasi, dan bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

Pada materi ini, ketika pada sesi diskusi, peserta merasa mendapat pemahaman baru terkait dengan masalah pelaksanaan dan pengawasan komunikasi. Selama ini, mereka tidak pernah melakukan koreksi terhadap keberhasilan komunikasi yang dilakukan. Hal yang perlu digarisbawahi dalam materi ini, koreksi harus dilakukan secara obyektif.

Keseluruhan hasil dari pelatihan manajemen komunikasi, peserta mendapatkan pemahaman baru. Hal ini juga terjadi dalam metode pelatihan lain, misalnya, pelatihan komunikasi efektif pada instansi pemerintah. Pelatihan difokuskan pada efektivitas pelayanan prima pada masyarakat ([Ramadhana & Sudrajat, 2020](#)). Adanya signifikansi yang positif terhadap hasil antara sebelum dan sesudah pelatihan. Terkait dengan hasil pelatihan yang dicapai tersebut diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan prima. Begitu juga, kegiatan pelatihan penyusunan perangkat untuk metode belajar berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) bagi guru akuntansi SMK ([Nuris, 2018](#)). Hasil memperlihatkan adanya kemampuan baru bagi pembelajaran berbasis TIK.

Dari sisi metode, pelatihan menjadi metode yang efektif untuk meningkatkan pemahaman terhadap suatu bidang. Pada kegiatan PKM pelatihan manajemen komunikasi pada FK BPD Kabupaten Subang juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan baru dalam pemberdayaan masyarakat. Pelatihan manajemen komunikasi pada FK BPD Kabupaten Subang, setidaknya mengurangi kelemahan atau keterbatasan yang dimiliki anggota BPD. Dengan demikian, dengan adanya kegiatan pelatihan ini mampu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia anggota BPD Kabupaten Subang, sehingga mampu menjalankan peran secara maksimal dalam pemberdayaan masyarakat.

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang di dapatkan dari hasil kegiatan pelatihan manajemen komunikasi Forum Komunikasi Badan Pemberdayaan masyarakat (FK BPD) Kabupaten Subang sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan pemahaman yang positif terkait dengan manajemen komunikasi yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat.
2. Berdasarkan tanggapan peserta merasakan kepuasan terhadap materi yang di sajikan. Hal ini ditunjukkan dengan 92.3 %, bahwa materi yang disajikan memberi manfaat dan pemahaman baru dalam pemberdayaan masyarakat.

Saran

Dalam kegiatan ini, peserta merupakan perwakilan dari Kabupaten Subang. Oleh karena itu agar terjadi pemerataan kemampuan anggota BPD Kabupaten Subang, maka perlu tindak lanjut pelatihan manajemen tingkat kecamatan, di Kabupaten Subang.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bhayangkara Jakarta yang telah memberi dukungan dan support dana dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini.

Referensi

- Algahtani., A. (2014). Are Leadership and Management Different? *A Review. Journal of Management Policies and Practices.*, 2(3), 71–82.
- Arends, R. Y., Bode, C., Taal, E., & Laar, M. A. F. J. van de. (2016). The longitudinal relation between patterns of goal management and psychological health in people with arthritis: The need for adaptive flexibility. *British Journal of Health Psychology*, 21(2), 469–489. <https://doi.org/10.1111/bjhp.12182>
- Cangara, H. (2013). *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Cutlip, S. M. (2008). *Effective Public Relation*. SAGE Publications.
- Haryanto, T., Hidayah, A., & Alfalisyo. (2020). *Komunikasi Bisnis, Metode dan Implementasi*. UM Purwokerto Press.
- Istiqomah, S. (2015). Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(1–15).
- J, Bartels, et al. (2010). Horizontal and vertical communication as determinants of professional and organizational identification. *Personnel Review*, (2): *Personnel Review*, 39(2), 210–26.
- Kaye, M. (1994). *Communication Management*. PT Erlangga.
- Nuris, D. M. (2018). Pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran berbasis tik bagi guru akuntansi SMK. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 256–260. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/dinamisia.v2i2.1819>
- Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Ramadhana, M. R., & Sudrajat, R. H. (2020). Pelatihan Komunikasi Efektif dalam meningkatkan Pelayanan Prima di Instansi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(4), 693–700. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i4.4099>
- Ridwan, M. (2020). *Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK BPD) Kabupaten Subang Akhirnya Terbentuk*. Warta Kini. <https://www.wartakini.co/2017/05/forum-komunikasi-bpd-se-kabupaten-subang-akhirnya-terbentuk/>
- Romli, O., & Nurlia, E. (2017). Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang). *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 36–49.
- Sutadi, O. (2020). *Wawancara*.
- Zepeda, A. V. (2018). Public Relations and Communication in Natural Disasters: The Case of the Earthquake of September 19, 2017 in Mexico. *Revista Latina de Comunicacion Social*, 73, 447–461. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2018-1264>.